

**ANALISIS PENCAPAIAN VISI MISI BUPATI
SIMEULUE PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI

OLEH

IIN SARTIKA
NIM : 1605905010104



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**

**ANALISIS PENCAPAIAN VISI MISI BUPATI
SIMEULUE PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

OLEH

IIN SARTIKA
NIM : 1605905010104



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 Juli 2021

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : IIN SARTIKA

NIM : 1605905010104

Dengan Judul : **Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode
2017-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.AN Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :
Pembimbing

Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc
NIDN. 0108058501

Mengetahui :

Ketua Jurusan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Basri, SH. MH
NIP. 196307131991021002



Fadhil Ilhamsyah, S.IP, M.Si
NIDN. 0017109104



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 Juli 2021

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : IIN SARTIKA
NIM : 1605905010104

Dengan Judul:

**ANALISIS PENCAPAIAN VISI MISI BUPATI SIMEULUE PERIODE
2017-2022**

Yang telah dipertahankan didepan dewan komisi penguji pada tanggal 12 Juli 2021 dan telah direvisi.

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc | |
| 2. Anggota | : Veni Nella Syahputri, M.Pd | |
| 3. Anggota | : Nodi Marefanda, M.AP | |

Mengetahui :
Ketua Jurusan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara
Fadhil Ihamsyah, S.IP, M.Si
NIDN. 0017109101

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IIN SARTIKA

Nim : 1605905010104

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya dan pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan ketersediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

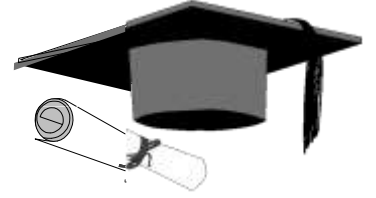
Meulaboh, 12 Juli 2021

Saya yang membuat pernyataan



IIN SARTIKA

NIM : 1605905010104



KATA PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselamatkan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi.

Alm Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Ruaina wati) dan Ayah (Alm Safran Alih) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku temotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, terimakasih Ibu terima kasih Ayah.

Sadudara –saudara yang saya sayangi

Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk Saudara saya (Nurhajisam, Sulaiman, Nelli Sulastri, Zul Hendri, Rosi Marlinda, Riski Indrawan). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Sahabatku

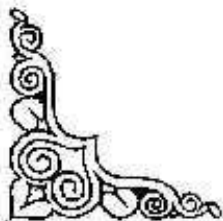
Buat sahabatku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuat ku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, (Des Adam, Oka Alfindra, Zhura, Oki Darma linda, Puji, Anes, Mimis, Jurnita). Terima kasih kawan-kawanku, kalian telah memberikan banyak hal yang tak terlupakan kepadaku.

Dosen Pembimbing

Ibu Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktu dan banyak membantu saya selama ini, yang tanpa mengenal lelah menasehati, mengajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Wassalam

IIN Sartika



BIODATA PENULIS

Nama : Iin Sartika
Nim : 1605905010104
Tmpt Tgl Lahir : Meunafa 08-06-1996
Agama : Islam
Alamat Tmpt Tnggal : Desa Meunafa, Ket Salang, Kab Simeulue.

Nama Orang Tua

Ayah : Mar Alinudin
Ibu : Haini

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Ibu Ruma Tangga
Alamat Org Tua : Padang Unoe, Kcamatan Salang, Kcamatan Simeulue.

Pendidikan yang telah ditempuh

- Min Meunafa
- MTS Meunafa
- Smk 1 Salang
- Universitas Teuku Umar

Pengalaman Organisasi

Bendahara Ippms 2018-2020

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” **Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022**”, Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ADM pada Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mendo’akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga skripsi ini terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’ruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
3. Bapak Basri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
4. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar

5. Ibu Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc selaku Pembimbing, yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini.
 6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
 7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
 8. Semua pihak yang tidak biasa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini
- Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 12 Juli 2021

Penulis

IIN SARTIKA

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the achievement of the vision and mission of the Regent of Simeulue Regency for the period 2017-2022 and to determine the obstacles in achieving the vision and mission of the regent of Simeulue Regency 2017-2022. This research is a descriptive study with a qualitative approach that describes the problems discussed based on the relevant data obtained and interpreting the data referred to as an analysis process to find the relevance between variables. The results show that the achievement of the Simeulue Regent's Vision and Mission for the 2017-2022 period has currently been achieved but has not been maximized so there is a need for a new breakthrough in improving the performance of the Simeulu district government in order to achieve the overall vision and mission. Obstacles in Achieving the Vision and Mission of the Regent of Simeulue for the 2017-2022 period include internal factors, namely finance, economic resources and human resources, while external or external constraints in achieving the vision and mission of the regent include program policies based on the results of an agreement between the regent and the local DPRK so that the program being implemented was not in line with the district head's mission.

Keywords: *Realization, Vision and Mission*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Simeulue periode 2017-2022 dan untuk mengetahui kendala dalam Pencapaian Visi dan Misi bupati Kabupaten Simeulue 2017-2022. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 pada saat ini sudah tercapai namun belum maksimal sehingga perlu adanya terobosan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten simeulu demi tercapainya visi misi secara menyeluruh. Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 diantaranya adalah Faktor internal yaitu keuangan, sumber daya ekonomi dan SDM, sedangkan Faktor kendala dari luar atau eksternal dalam pencapaian visi misi bupati adalah diantaranya adalah Kebijakan program berdasarkan hasil kesepakatan antara bupati dan DPRK setempat sehingga program yang dijalankan tidak selaras dengan misi bupati.

Kata Kunci : Realisasi, Visi dan Misi

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
BIODATA PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pemerintahan Daerah	9
2.3 Pencapaian Atau Kinerja	12
2.4 Visi Misi Bupati Simeulue Priode 2017-2022	14
2.5 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah	16
2.5.1 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
2.5.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah	24
2.5.3 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Metode Penelitian	27
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.2.1 Sumber Data	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3 Instrumen Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian.....	29
3.5 Teknik Analisa Data	30
3.6 Uji Kredibilitas Data.....	31

3.7 Waktu dan Jadwal Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	33
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2.1 Keadaan Geografi	34
4.2.2 Keadaan Iklim dan Cuaca	35
4.2.3 Sosial Budaya	35
4.2.4 Keadaan Demografi	36
4.2.6 Ekonomi.....	37
4.2.7 Teknologi	37
4.2.8 Struktur Organisasi	38
4.2.9 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue	41
4.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional.....	46
4.3 Hasil Penelitian	48
4.3.1 Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi.....	48
4.3.2 Kendala pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi	60
BAB V PEMBAHASAN	64
5.1 Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi erakyatan dan pemanfaatan teknologi.....	64
5.2 Kendala pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi	66
BAB VI PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Perencanaan	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.Data Narasumber/Informan.....	30
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya perwujudan visi tersebut tentu melalui perumusan misi penyelenggaraan pemerintahan, dan secara praktis, implementasi misi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui tahapan formulasi kebijakan yang melahirkan program dan kegiatan pembangunan. Idealnya, dalam formulasi kebijakan dan

implementasi harus terintegrasi dan konsisiten baik secara konseptual maupun penerapannya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara nasional, berdasarkan prinsip otonomi dan desentralisasi, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antara daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjaminadanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,serta pengendalian dan pengawasan. (Darise 2008

Bupati Kabupaten Simeulue bapak H. Erli Hasyim, SH, S.Ag, M.I.Kom dan wakil Bupati Ibu Hj. Afrida Wati, dalam kepemimpinannya seorang petugas pemerintah memiliki visi yakni “terwujudnya Simeulue yang maju, sejahtera da bermartabat yang berbingkai masyarakat yang madani”. Dimana dengan visi ini pemerintah bertujuan untuk mewujudkan agar daerah Simeulue menjadi daerah yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera, sebab sebelumnya dapat kita lihat bahwa, meski daerah semelue itu tida terlalu luas namun kesejahteraan tidak perna dirasakan masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang karang mampu, hal ini dikarenakan pemerintah belum sukses dalam pengimplementasian visi dan misinya.

Sedangkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 adalah: (1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata. (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi. (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (5) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum. (6) Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (7) Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian. (8) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dengan pengalaman nilai-nilai syariat. (9) Membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Bedasarkan misi diatas peneliti berfokus pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi. Dimana dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan Bupati Simeulue sudah menciptakan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan dalam pengembangannya. Salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi pembinaan, pendampingan langsung maupun peningkatan permodalan walupun misi ini belum berjalan 100 persen. Dalam beberapa masalah mendasar dalam pengembangan usaha yang menjadi basis ekonomi kerakyatan antara lain keterbatasan modal dan bahan baku.

Melihat dari visi misi yang sudah dituangkan pada waktu kampanye dulu dengan slogan "Simeulue Sejahtera", kenyataan, sekarang masih jauh dari apa

yang diharapkan, sementara pada tanggal 20 Juli 2019, tepat 2 tahun masa pemerintahan Erly Hasyim-Afridawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue. Hal itu disampaikan Ketua umum Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Banda Aceh, Isra Fu'addi melalui pers releasenya yang diterima PemburuNews, Sabtu (20/07/2019). "Simeulue Belum Sejahtera," kata Isra. Isra menyebutkan, ada 5 program khusus yang dijanjikan, yakni, memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan dan kerjasama (KSO) antara PDKS dan PT Kasama ganda dan merehabilitasi tanaman yang sudah rusak/mati, melanjutkan perjuangan untuk merealisasikan pemekaran kabupaten selaut besar. Ia melanjutkan, sementara janji lainnya, memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Simeulue yang berprestasi dan kurang mampu sampai ketingkat S3, mengupayakan peningkatan gaji bagi tenaga honor daerah, tenaga kontrak dan bakti, minimal sesuai dengan upah minimum regional (Pemburu News, 2019).

Permasalahan yang paling menadasar yang secepatnya harus di capai pada pemerintahan Bupati Simeulue periode 2017-2022 adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi, sebab kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang paling mendasar yang harus di atasi oleh pemerintah kerana ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya implentasi visi dan misi pemerintah. Permasalahan tersebut seperti hal nya adanya sifat lebih mengedepankan daerah asalnya ataupun daerah-daerah yang lebih banyak mendukung, sementara yang daerah yang kurang mendukung kepemimpinannya itu maka kurang diperhatikan. Permasalahan Iainnya yaitu masih adanya penerima

manfaat yang tidak tepat sasaran, lalu belum massifnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tangga Miskin sebagai prioritas utama dalam penetapan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, dan terakhir kurang akuratnya Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tangga Miskin Kabupaten Simeulue. Masalah-masalah ini tentu akan menjadi penghambat visi misi Bapak Bupati dalam mewujudkan Simeulue Sejahtera. Untuk itu, menurut perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji tentang penelitian “**Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai?
2. Apa saja kendala Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Simeulue periode 2017-2022.

2. Untuk mengetahui kendala dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Simeulue 2017-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.
2. Dapat memotivasi peneliti lain untuk meneliti kembali variabel yang sama atau berbeda dalam rangka penerapan ilmu terutama Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.
3. Dapat menjadi bahan referensi bagi arsip perpustakaan Universitas Teuku Umar Meulaboh dan perpustakaan Fisip Universitas Teuku Umar Meulaboh.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak masyarakat untuk meningkatkan Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.
2. Bagi penulis agar dapat mengetahui Studi Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 disamping itu juga merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi pengunjung lainnya, khususnya dibidang ilmu administrasi negara.
3. Semoga menjadi informasi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang Studi Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 khususnya di perpustakaan Universitas Teuku Umar.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini maka penulis telah membagi tulisan ini kedalam bagian yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan memaparkan mengenai Penelitian Terdahulu, Teori Pencapaian, Pemerintaahan, Bupati , Visi Misi Bupati Semeulue.

BAB III : Metodologi penelitian

Dalam Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian kredibilitas data

BAB IV Hasil Penelitian

Penulisan pada bab ini terdiri dari deskripsi lokasi dan temuan hasil penelitian

BAB V Pembahasan

Penulisan pada bab ini terdiri dari pembahasan hasil wawancara yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI Penutup

Penulisan pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya dapat kita lihat seperti bawah ini:

Hasil penelitian Efri Noviato (2013) tentang “ evaluasi kinerja pemerintahan gerbang raja”, menunjukkan bahwa pemerintah gerbang raja sudah melaksanakan kinerjanya dengan sangat baik dan masyarakat merasa sudah puas terkait pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah, yakni di tahun 2013 pencapaiannya sudah 70,18% telah di implementasikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian Dwi Sukaningtyas, Djam'an Satori (2016) tentang “pengembangan kapasitas manajemen sekolah dalam membangun pemahaman visi dan misi”. menunjukkan bahwa sekolah yang membangun pemahaman visi dan misi berdasarkan nilai-nilai luhur pendiri lebih memiliki dasar kuat untuk pengembangan kapasitas manajemen sekolah. Dan tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis kapasitas manajemen sekolah dalam membangun visi dan misi.

Hasil penelitian Taslim Sahmad, Deddy T. Tikson, H. Badu Achmad (2012) tentang “gaya kepemimpinan Bupati luwu di Balopa Provinsi Sulawesi Selatan: pandangan managerial grid”. Menunjukkan hasil penelitian bahwa Bupati luwu menerapkan gaya kepemimpinan managerial grid 6,7. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis gaya kepemimpinan Bupati luwu sesuai dengan managerial grid.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang visi misi pemerintahan, sedangkan perbedaannya penelitian peneliti, yakni peneliti lebih ke **Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022**.

2.2 Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan umum Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan administrasi pemerintahan dan perizinan perkotaan adalah prosedur yang berbelit-belit dan tidak transparan, sehingga konsep birokrasi lebih dikenal dan diartikan sebagai suatu yang menyusahkan karena berbelit-belit, tidak efisien dan korup.

Oleh karna itu pemerintah daerah memiliki tujuan dari fungsi pelayanan publik maka harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sisi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang dapat dilayani, dan menambah waktu pelayanan, sedangkan sisi kualitas dapat dilakukan dengan mengurangi kesalahan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan kemudajan pelayanan. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan tentu saja terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pelaksana unit-unit publik tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai aparat harus mampu mengembangkan dan mendayagunakan mereka,

sehingga dapat meningkatkan kualitas mereka. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fungsi dan kegiatan bagian kepegawaian (personalia) untuk menjamin bahwa mereka diperankan secara efisien dan efektif.

Efisiensi dan efektifitas pendayagunaan aparat dapat dilihat dari tingkat produktifitas yang tinggi sebagaimana diungkapkan Sutermeister yang dikutip oleh Suparlan (2000), bahwa produktifitas akan tergantung pada kinerja aparat. b. Otonomi Daerah Dalam UU No. 5 tahun 2015 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2012:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 2015 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam pasal 1 ayat 7, 8, 9 UU No. 5 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu: 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa

atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatankegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka pelayanan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian dasar (Yuliati, 2001: 22).

Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan UU No. 5 Tahun 2005 pada dasarnya adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Pemberian otonomi daerah juga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi

sektor publik tersebut tidak sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai.

2.3 Pencapaian/Kinerja

Pencapaian merupakan kondisi yang harus diketahui dan informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahkan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. kinerja (*performance*) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan (Handoko, 2011:63).

Berikut adalah beberapa pengertian kinerja oleh beberapa pakar yaitu:

- a. Menurut Winardi (2012:43) kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

- b. Menurut Gomes (2010:18) kinerja merupakan catatan terhadap produksi dari sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu.

Menurut Dessler (2007:28) penilaian pencapaian terdiri dari tiga langkah, pertama mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan sepakat dengan tugas-tugasnya dan standar jabatan. Kedua, menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, dan ini mencakup beberapa jenis tingkat penilaian. Ketiga, sesi umpan balik berarti kinerja dan kemajuan atasan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut.

Menurut Hariandja (2007:52) bahwa pencapaian merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja dan motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaan secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja.

Pengertian pencapaian dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik tampilan keuangan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2008: 480).

Pencapaian/Kinerja aparat di dalam pekerjaannya pada dasarnya akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam individu yang disebut dengan faktor individual, dan kondisi yang berasal dari luar individu yang disebut dengan faktor situasional. Faktor individual meliputi jenis kelamin, kesehatan, pengalaman, dan karakteristik psikologis yang terdiri dari motivasi, kepribadian, dan locus of control. Adapun faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi (Falikhatun, 2003).

2.4 Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022

Menurut Scott A. Bernard (2005, p117), sebuah visi mendeskripsikan secara singkat strategi kompetitif dari sebuah perusahaan. Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat. Sebuah pernyataan visi lebih dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi ditujukan pada semua anggota dari perusahaan untuk mengerti arah dan tujuan utama yang sedang dituju, agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut keluar dan kedalam perusahaan.

Menurut Scott A. Bernard (2005, p 117), sebuah pernyataan misi mendeskripsikan secara ringkas tujuan dari perusahaan. Pernyataan misi ini biasanya panjang untuk menjelaskan poin pada misi tetapi tidak terlalu

mendetail. Sebuah pernyataan misi menjawab pertanyaan “Siapakah kami?” pada tingkat keseluruhan perusahaan.

Bupati Kabupaten Simeulue periode 2017-2022 adalah Bapak H. Erli Hasyim, SH, S.Ag, M.I.Kom dan wakil Bupati adalah Ibu Hj. Afridawati. Pemerintahan Kabupaten Simeulue di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 memiliki visi dan misi yang dimana visinya adalah:

- (1) Adil, yaitu masyarakat Simeulue yang memiliki akses dan jangkauan layanan kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang merata dan proporsional diseluruh Kecamatan tidak timpang.
- (2) Sejahtera, yaitu suatu kondisi terpenuhinya hak-hak dasar secara layak mencakup pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan tenteram serta pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan, politik dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Nilai-Nilai Syariat, yaitu suatu kondisi meningkatnya nuansa-nuansa islami dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan penerapan nilai-nilai islam kaffah dalam seluruh aktifitas, berakhlak mulia, jujur dan adil, bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu pengetahuan tinggi, terwujudnya keluarga sakinah serta memelihara hubungan yang harmonis sesama antar umat beragama.

Sedangkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 adalah:

- (1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi.
- (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.
- (5) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum.
- (6) Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (7) Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian.
- (8) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dengan pengalaman nilai-nilai syariat.
- (9) Membangun hubungan baik dengan pemerintah daerahlain, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

2.5 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

2.5.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 Dikemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu”. Proses perencanaan pembangunan dapat di bagi menjadi empat proses (permendagri 54/2010), yaitu :

1. Proses Teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencanaan profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat di pertanggung jawabkan, metode dan kerangka berpikir ilmiah, antara lain di gunakan untuk:

- a. Me-review menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. Merumuskan prioritas kemampuan keuangan daerah dan sumber data lainnya berdasarkan berkembang kondisi makro ekonomi;
- f. Merumuskan prioritas prokgeram dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian . lokasi serta kelompok sasaran program /kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;

- h. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan ,serta perkiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. Menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana, pengendalian dan efakuasi rencana pembangunan daerah.

2. Proses Partisipatif

Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan :

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesejahteraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non-pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan terpinggirkan dan pengarusutamaan gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah ; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan , seperti rumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program;

3. Proses Politik

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye. Pendekatan politis di masukan bahwa program –program pembangunan yang di tawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun kedalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam tujuan, starategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknik penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

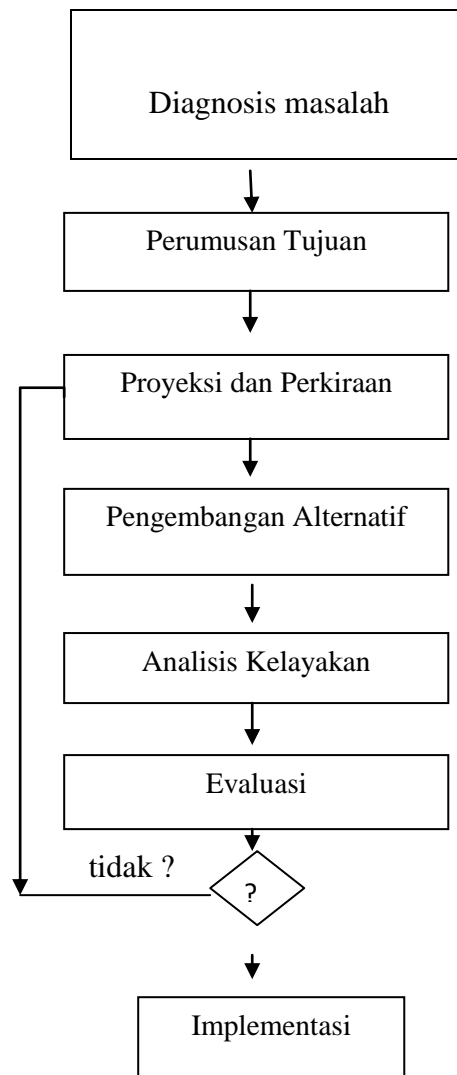
4. Proses Bottom-up dan Top-down

Perencanaan yang aliran peroses dari atas kebawah atau dari bawah keatas dalam hierarki pemerintahan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bahwa-atas {bottom-up} dan atas bawah {top-down}, hasilnya diselesaikan melalui musawarah yang dilaaksanakan mulai dari desa , kecamatan, kabupate/kota, provensi dan nasional , sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan derah. Perencanaan pembangunan dirumuskan (Permendagri 54/2010) secara:

1. Teransparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
2. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah;
3. Efisien, pencapaian keluar tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal ;
4. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal;
5. Akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID – Clean Urban Project (2000) mendefinisikan perencanaan pembangunan Daerah adalah Suatu di sistematik dari berbagai pelaku (Aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya ada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek – aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek - aspek lingkungan lainnya dengan cara : (a), terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b), merumuskan tujuan- tujuan dan kebijakan kebijakan pembangunan daerah; (c), menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d), melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan capaian perencanaan.

Perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa akan datang (dalam satu lingkup waktu tertentu) serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya Kartasmita (dalam Ali Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarso (2017)). Proses perencanaan dapat didekati dengan analisis sistem yang komponen-komponennya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Proses Perencanaan

a. Diagnosis Masalah

Perencanaan dimulai dengan adanya ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada, berupa isu-isu yang berkembang dan dikembangkan. bila tidak ada isu atau masalah tentu tidak akan ada kebutuhan dan tindakan. Diagnosis masalah tergantung pada gambaran keadaan yang diinginkan, yang berfungsi sebagai sasaran {goal} yang akan dituju. Pendefinisian masalah ditujukan untuk mencari pemecahan masalah yang bersangkutan. Akan tetapi, definisi juga tergantung pada orientasi analisis yang akan dilakukan oleh individu bersangkutan.

b. Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan berkaitan dengan definisi masalah, oleh karena itu pendefinisian masalah merupakan hal yang sangat penting. Apabila definisi masalah dapat dibuat dengan jelas, maka pendefinisian tujuanpun dapat dilakukan dengan jenis. Tantangan yang tersulit dalam perencanaan adalah menerjemahkan tujuan-tujuan yang kabur dan saling tidak setaras dengan sasaran-sasaran operasional yang ingin dicapai. Tujuan harus lebih dahulu dirumuskan sebelum rencana tidak akan dikembangkan dalam sasaran-sasaran jangka pendek ataupun jangka panjang.

c. Proyek dan Perkiraan

Orientasi masa depan sangat ditekankan dalam definisi perencanaan. Produksi merupakan aspek yang penting dalam mengevaluasi dan penentuan alternatif-alternatif yang mungkin tidak dilakukan. Evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa memproyeksikan dampak berbagai alternatif kedalam kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa depan. Proyeksi dan perkiraan sangat tergantung pada data. Informasi yang kita miliki dan kontinuitas fenomena yang dianalisis.

d. Pengembangan Alternatif

Suatu rencana yang baik tidak akan keluar dari serangkaian alternatif. Proses perencanaan sering kali mengabaikan pengembangan alternatif. Padahal tahap ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada kualitas keputusan akhir, sebab keputusan tersebut berasal dari rangkaian pilihan yang akan dipilih dalam rencana tersebut.

e. Analisis Kelayakkan

Analisis kelayakkan mengajukan pertanyaan tentang setiap pilihan yang telah dikembangkan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebenarnya muda untuk dikenali bila hambatan tersebut telah diperimbangkan lebih dahulu, namun yang sering terjadi justru hal ini diabaikan dalam perencanaan. Hambatan-hambatan yang kurang nyata dapat berupa hambatan politik atau kelembagaan, dan hal-hal ini pun harus dipertimbangkan dalam suatu rencana yang realistis.

f. Evaluasi

Tahap evaluasi dimulai bila perencana telah mempunyai sejumlah alternatif yang diperkirakan akan dapat dilaksanakan. Bila hanya ada satu alternatif, maka harus ada keputusan “ya itu tidak”, yaitu untuk melaksanakan rangkaian tindakan yang diusulkan atau tidak melakukan apa –apa sama skali. Suatu kriteria yang umum digunakan adalah efisiensi. Alternatif mana yang memberikan hasil terbanyak dengan biaya yang sama.

g. Pelaksanaan (Implementasi)

Suatu komitmen politik yang kuat nampaknya merupakan suatu syarat yang diperlukan, walaupun belum tentu mencukupi. Tujuan-tujuan yang didefinisikan secara jelas, yang dapat diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran

yang dapat dimonitor, merupakan hal yang penting, akhirnya, proyek-proyek yang sederhana mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan lebih besar, karena organisasi pelaksana yang relatifnya otonomi dibandingkan dengan rencana (proyek) yang sifatnya kompleks dan memerlukan kerjasama dengan banyak unit yang saling bergantung (inter dependence).

2.5.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Seperti hal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah terdiri beberapa tahapan yang menghasilkan dokumen-dokumen rencana. Namun dalam proses perencanaan pembangunan daerah, berpegang pada prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut (UU No 25/2004):

1. Memperkuat kooperirasi/kemitraan antara politikus, masyarakat, pakar, dan aparat pemerintah pusat/daerah dalam suatu rangkaian proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, dan proses bottom-up & top-down. Tradisi perencanaan ini dikenal sebagai tradisi Analisis Kebijakan.
2. Merangkai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-Rencana Strategis Suatu Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hubungan sinambungan antara dimensi materi, ruang, dan waktu yang nyata.
3. Memastikan bahwa perencanaan pembangunan terpadu ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas politik; bahwa pelaksanaan rencana

pembangunan {daerah} tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan /kewenangan kepemimpinan penyelenggaraannya yang lahir dari proses politik. Dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah, proses politik masuk sebagai bagian awal proses perencanaan.

4. Mengembangkan kesatuan antara proses-proses perencanaan, pengelolaan kinerja, dan anggaran; prinsip dasarnya adalah membiayai keluaran bukan membiayai kegiatan atau proyek.
5. Memastikan pengembangan program- program, proyek- proyek, aktivitas- aktivitas, dan target- target untuk mencapai strategi (rencana) pembangunan daerah; prinsip hubungan struktural dan organik-batang-ranting.
6. Memperkuat keterkaitan dan kepaduan penyediaan pelayanan ke seluruh wilayah berdasarkan pendekatan sektor, kewilayahan, dan kelembagaan.
7. Memberdayakan dan membudayakan pelaporan pertanggung jawaban kinerja dan keberhasilan secara jelas/eksplisit dan terukur, menuju objektivitas dan meningkatkan subjektivitas yang sejalan dengan meningkatkan kredibilitas komunikasi perencanaan.

2.5.3 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyusunan suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang

diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi. Fisik (infrastruktur) yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membuat variabel penelitian dengan beberapa indikator

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mendeskripsikan menurut Moleong (2010:10). Wawancara mendalam dan survey terhadap subjek penelitian.

Melalui pendekatan ini penulis akan menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Penelitian akan melihat Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:187) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah data visi misi yang telah di capai oleh pemerintahan Bupati Simeulue periode 2017-2022.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:187) data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah data langsung yang diperoleh dari jawaban pedoman wawancarainformanpenelitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen barang-barang tertulis. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati sambil terus melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala bentuk informasi yang berkaitan dengan Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah penelitian untuk memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil foto dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Subana dan Sudrajat(2012:127) instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel-variabel yang diteliti. Secara garis besar, instrumen terbagi 2 yaitu instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes dapat berupa tes objektif dan tes uraian, sedangkan instrumen yang tergolong nontes diantaranya dapat berupa angket, wawancara, observasi atau studi dokumentasi.

Dalam penelitian tentang Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2011:133) informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008:86). Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check* data.

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan). *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2012:85) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, informan yang peneliti ambil ialah sepuluh informan.

Tabel 3.1.
Data Narasumber/Informan

Narasumber/informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:	
a. Staf Pemerintahan Bupati Simeulue	2 Orang
b. Pengamat Politik Pemerintahan Simeulue	2Orang
c. Mahasiswa Simeulue	2 Orang
d. Masyarakat	4 Orang
Jumlah	10 Orang

3.5 Tehnik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, selain itu melakukan pembuangan terhadap data yang dianggap tidak perlu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan-kesimpula final yang diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu melakukan penyajian data dari keadaan atau fenomena sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi atau menarik kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk dan telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu

melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

3.6 Uji Kredibilitas Data

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi 4 antara lain:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini Dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk di pergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

2. Memberchek, yaitu mengulang garis besar apa yang diungkapkan oleh informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta menambah apabila terdapat beberapa kekurangan.

3. Perpanjangan pengamatan

4. Diskusi dengan teman.

3.7 Waktu dan Jadwal Penelitian

Adapun tabel jadwal penelitian yang dilaksanakan dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan November 2019.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan Penelitian						
2	Pengumpulan Data Skunder						
3	Penelitian awal dan Seminar proposal						
4	Penelitian Lapangan						
5	Pengolahan Data						
6	Sidang Akhir						

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kantor Bupati Simeulue yang beralamat di Jalan Teuku Diujung Sinabang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur (Simtim). Pada bab ini penulis ingin menjabarkan atau mendeskripsikan tentang lokasi penelitian serta capaian visi misi yang telah di implementasikan oleh Bupati Simeulue selama masa jabatan dari 2017 sampai sekarang terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis teknologi. Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan konsep konsep yang telah dipaparkan sebelumnya.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Simeulue menjadi sebuah kabupaten telah dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue. Sebelum tahun 1965, wilayah yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh ini merupakan salah satu kawedanan dan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Sejak tahun 1967 sampai tahun 1996. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang ±100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi,

Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-khalak, Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

4.2.1 Keadaan Geografi

Letak Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di sebelah barat daya provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh selatan serta berada pada koordinat 2°15' - 2°55' LU dan 95°40' - 96°30' BT. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 147 pulau besar dan kecil, luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.839,09 Km² atau 183,809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu pulau Siumat, pulau Panjang, pulau Batu Berlayar, pulau Teupah, pulau Mincau, pulau Simeulue Cut, pulau Pinang, pulau Dara, pulau Langeni, pulau Linggam, pulau Leukon, pulau Silaut Besar dan Silaut kecil (terluar), pulau Tepi, pulau Ina, pulau Alafulu, pulau Penyu, pulau Tinggi, pulau Kecil, pulau Khalak-khalak, pulau Asu, pulau Babi, pulau Lasia dan pulau-pulau lainnya. Kepulauan ini di kelilingi oleh Samudra Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan internasional. Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam. (BPS Kabupaten Simeulue 2017-2021).

4.2.2 Keadaan Iklim dan Cuaca

Daerah Simeulue pada umumnya beriklim tropika basah dengan curah hujan rata rata 3.170 mm / Tahun, dan 234 hari hujan pada tahun 2014. Keadaan cuaca di tentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari, sehingga terjadi hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung pada bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi kemarau yang di selingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif tenang. Suhu berkisar antara 25⁰C – 33⁰C serta kelembaban nisbi antara 60% - 75% yang berlangsung sepanjang tahun. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

Kepulauan Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik tetapi memiliki curah hujan yang tinggi karena di kelilingi samudera yang luas. Tanahnya umumnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi , seperti podsolik merah kuning, podsolik merah coklat, alluvial, organosol, batu kapur dan tanah gambut. Titik terendah pulau Simeulue terletak pada nol meter diatas permukaan laut. Sedangkan titik tertingginya terletak 600 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 0 – 300 meter di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit - bukit dengan kemiringan dibawah 18⁰ yang terletak di tengah pulau. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

4.2.3 Sosial Budaya

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah. Pulau ini memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Devayan, bahasa Leukon, dan bahasa Sigulai yang digunakan sebagian besar

masyarakat. Khusus sekitar kota Sinabang, menggunakan bahasa masyarakat pesisir Sumatera (bahasa Aneuk Jamee). Akibat akulturasi budaya menyebabkan Simeulue memiliki beberapa kesenian yang diadopsi dari berbagai suku seperti Aceh, Nias, Batak dan Sulawesi (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue memeluk agama Islam dan umumnya masyarakat cepat beradaptasi dengan para pendatang sehingga tidak menyulitkan dalam pergaulan sehari-hari. (BPS Kabupaten Simeulue 2017-2021).

4.2.4 Keadaan Demografi

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan pendidikan telah dimulai sejak manusia itu ada dan menjadi salah satu sarana manusia dalam mencari arah dalam mencapai tujuan hidup. Kemajuan pendidikan suatu daerah tidak lepas dari usaha pemerintah. Jumlah lembaga pendidikan formal Kabupaten Simeulue Tahun 2021 yang paling banyak adalah lembaga pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 127 unit, TK dan PAUD yaitu sebanyak 117 unit, kemudian, SLTP/MTs Negeri dan swasta sebanyak 54 unit, SLTA/MA Negeri dan swasta sebanyak 29 unit, SMK sebanyak 6 unit dan POMPES dan Diniyah sebanyak 8 unit.

4.2.5 Kondisi Sosial

Pada umumnya warga masyarakat telah menerima dan menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara, namun implementasi di lapangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan terlebih dengan bergulirnya era globalisasi sehingga terkesan

Pancasila bukan merupakan hal yang harus benar-benar dihayati dan diamalkan sebagai pedoman dalam hidup bangsa Indonesia.

4.2.6 Ekonomi

- a. Kabupaten Simeulue memiliki ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan yaitu disektor pertanian, peternakan dan perikanan serta home industri yang telah menunjukkan kemajuan.
- b. Bahan pokok terutama beras, gula, terigu, masih didatangkan dari luar daerah dengan harga relatif naik turun namun terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Lapangan kerja yang tersedia adalah dimana terdapat PT. PDKS yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, dan usaha perumahan yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan dan nelayan.

4.2.7 Teknologi

Pelaksanaan program teknologi yang merupakan determinasi program komunikasi pembangunan ditingkat nasional dan direncanakan hingga tingkat daerah dalam beberapa belum berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari kondisi awalnya, program yang dicanangkan oleh Kemkominfo berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PT.Telkom Indonesia berjalan baik. Namun dalam perjalanannya beberapa fasilitas tidak bisa digunakan oleh beberapa SDM pengelola PLIK di Simeulue. Pada skala mikro, PLIK menjadi bagian sistem komunikasi di tingkat pembangunan daerah, karena perangkat teknologi komunikasi tersebut diaplikasikan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Peluang dalam pemanfaatan PLIK sangat besar, karena saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue menghadapi kendala yang muncul

berkaitan dengan pemilihan lokasi dan ruangan yang kurang tepat, pendampingan yang kurang baik, lemahnya pengetahuan komputer masyarakat, dan kurangnya pelatihan TIK untuk Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan Dalam Sistem Komunikasi Pembangunan Daerah.... Budiman 57 masyarakat serta infrastruktur listrik yang belum memadai. Lemahnya pemanfaatan teknologi tersebut karena lemahnya kelembagaan yang tersedia. Tidak dilakukannya dialog dengan masyarakat ketika teknologi ini diperkenalkan, membuat masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki dari proyek tersebut. Kurangnya antusiasme masyarakat dalam program ini bisa berakibat pada tingkat partisipasi dalam pembangunan nasional, Ini karena terputusnya akses informasi terutama yang terkait dengan pembangunan nasional. Agar pelaksanaan pembangunan PLIK dapat berjalan dengan baik, harus dipertimbangkan tentang lokasi pendistribusian program PLIK, bobot informasi, khalayak pengguna, dan pembiayaan. Sehingga proses komunikasi berbasis internet dapat berjalan dengan baik dan mendukung ekologi sistem komunikasi di daerah. Aspek kelembagaan juga harus diperkuat, antara lain bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada perencanaan sehingga keterlibatan mereka berakibat pada perasaan ikut memiliki dan menjaganya (sense belonging).

4.2.8 Struktur Organisasi

Berlandaskan pada qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Simeulue yakni:

1. Susunan organisasi Sekda, terdiri dari:

- 1) Sekda;
- 2) Asisten;
- 3) Staf ahli Bupati ;
- 4) Bagian
- 5) Sub bagian; dan
- 6) Kelompok jabatan fungsional.

2. Asisten, terdiri dari:

- 1) Asisten pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat;
- 2) Asisten perekonomian dan pembangunan; dan
- 3) Asisten administrasi umum.

3. Asisten pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. Bagian pemerintahan, membawahi:

- 1) Sub bagian administrasi pemerintahan;
- 2) Sub bagian administrasi kewilayahan; dan
- 3) Sub bagian kerjasama dan otonomi daerah.

b. Bagian keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat, membawahi:

- 1) Sub bagian administrasi pemerintahan;
- 2) Sub bagian kesejahteraan sosial; dan
- 3) Sub bagian kesejahteraan masyarakat.

c. Bagian hukum, membawahi:

- 1) Sub bagian perundang-undangan;
- 2) Sub bagian bantuan hukum; dan

3) Sub bagian dokumentasi dan informasi.

4. Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, terdiri dari:

a. Bagian perekonomian dan sumber daya alam, membawahi:

- 1) Sub bagian pembinaan bumd dan blud;
- 2) Sub bagian perekonomian; dan
- 3) Sub bagian sumber daya alam.

b. Bagian administrasi pembangunan, membawahi:

- 1) Sub bagian penyusunan program;
- 2) Sub bagian pengendalian program;
- 3) Sub bagian evaluasi dan pelaporan;

c. Bagian pengadaan barang dan jasa, membawahi:

- 1) Sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- 2) Sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) Sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

5. Asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri

dari:

a. Bagian umum, membawahi:

- 1) Sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- 2) Sub bagian perlengkapan; dan
- 3) Sub bagian rumah tangga.

b. Bagian organisasi, membawahi:

- 1) Sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- 2) Sub bagian perlengkapan;

- 3) Sub bagian rumah tangga.
- c. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi:
- 1) Sub bagian protokol;
 - 2) Sub bagian komunikasi pimpinan; dan
 - 3) Sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi.
- d. Bagian perencanaan dan keuangan, membawahi:
- 1) Sub bagian perencanaan;
 - 2) Sub bagian keuangan; dan
 - 3) sub bagian pelaporan.
6. Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Staf ahli Bupati bidang perekonomian, hukum dan politik;
 - b. Staf ahli Bupati bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan; dan
 - c. Staf ahli Bupati bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan kerjasama.
7. Bagian struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati .

4.2.9 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue

Tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

A) Tugas dan Fungsi Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Simeulue.

1) Tugas

- a. Sekda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekda mempunyai tugas memimpin sekretariat daerah dan membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5, Sekda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoorganisasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat Kabupaten;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B) Asiten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas

- a. Asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat merupakan unsur pembantu Sekda yang mengoordinir di bidang

pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesejahteraan rakyat dan hukum serta pelaksanaan tugas perangkat daerah.

- b. Asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan aceh, kesejahteraan rakyat dan hukum.

2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan aceh serta kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan aceh, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

C) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1) Tugas

- a. Asisten perekonomian dan pembangunan merupakan unsur pembantu sekda yang mengoordinir di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- b. Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu sekda dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 30, asisten perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan; pengadaan barang dan jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekda bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

D) Asisten Administrasi Umum

1) Tugas

- a. Asisten administrasi umum merupakan unsur pembantu sekda yang mengoordinir di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- b. Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 51, asisten administrasi umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di idang umum, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh sekda di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

E) Staf Ahli

1) Tugas

Staf ahli sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas:

- a. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan kerjasama.

4.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut aturan qanun Kabupaten Simeulue, ada beberapa kelompok jabatan fungsional yang telah di tetapkan oleh pemerintah Simeulue antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 78, kelompok jabatan fungsional pada Sekda mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Pasal 79, kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan ahlinya.
3. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekda.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Qanun Kabupaten Simeulue juga menjelaskan terkait kepegawaian, jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian demana sebagai berikut:

a. Kepegawaian

1. Sekda diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati .
2. Asisten, staf ahli Bupati , kepala bagian dan sub bagian pada sekda diangkat dan di berhentikan oleh Bupati .
3. Pejabat fungsional diangkat dan di berhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Undur-unsur lain di lingkungan Sekda diangkat dan diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan.

b. Jabatan

1. Pasal 81, jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 82, sekda merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan Eselon II.a.
3. Asisten dan staf ahli Bupati merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
4. Kepala bagian merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.a.
5. Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan Eselon IV.a.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi”.

Salah satu hal terpenting Kantor Bupati dalam merumuskan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (impact) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Rumusan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang ini kemudian dirangkum secara jelas dan padat dalam rumusan visi dan misi pembangunan.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Simeulue tahun 2017-2022, yakni “Terwujudnya Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani”. Makna dari “Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani” adalah Simeulue sebagai sebuah kota yang warganya memegang teguh nilai budaya, mampu mengatasi berbagai

tantangan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, memiliki indikator pertumbuhan sosial dan ekonomi yang baik, serta terpenuhi segala kebutuhannya lahir maupun batin.

Simeulue Seluruh wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 dan penduduk yang terjaga secara administrasi sebagai penduduk Kabupaten Simeulue.

Madani Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya

Maju artinya Sikap dan kondisi masyarakat Simeulue yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju yang ditandai dengan pemantapan infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna pemerataan pendapatan masyarakat.

Sejahtera artinya Kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Bermartabat artinya Sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan berlandaskan Dinul Islam serta memperhatikan kearifan lokal.

Berdasarkan paparan visi dan misi diatas apakah semuanya visi dan misi yang dituangkan pada saat ini sudah tercapai atau belum. Hal ini dilihat

berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nara sumber salah satunya adalah AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati simeulue pada saat ini sudah tercapai 80 persen dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

Kemudian NS (Asisten dua Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“setiap daerah mempunyai visi dan misi tersendiri berdasarkan kinerja pemerintah selama ini terkait pencapaian visi dan misi bapak Bupati sudah menjalankannya secara menyeluruh walaupun belum sempurna seutuhnya karena masa jabatan beliau masih ada sampai 2022 nanti, setiap program yang dirancang selama ini sudah dijalankan sesuai visi dan misi beliau (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati simeulue pada saat ini sudah tercapai dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya kinerja pemerintah selama ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan selama ini walaupun tidak semuanya tercapai paling tidak sudah tercapai 70 persen menurut saya. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut telaah kami kinerja pemerintah selama ini sudah dijalankan sesuai dengan konsep dari mereka walaupun kenyataannya banyak yang belum tercapai. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah Kabupaten Simelue kalau menurut hemat saya banyak yang belum beres kalau secara khusus, namun kalau secara umum, adalah sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah selama ini sudah bagus , sudah sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum meratanya pembangunan secara keseluruhan, artinya visi misi yang sudah di paparkan dihadapan masyarakat dulu belum berjalan sebagaimana yang dikatakan. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati simeulue pada saat ini sudah tercapai 80 persen sehingga perlu adanya terobosan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten simeulu demi tercapainya visi misi secara menyeluruh .

Fokus penelitian yang Kedua yaitu perumusan tujuan Bupati terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi dan teknologi sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa orang narasumber terlihat dan terungkap dalam penelitian lapangan dibawah ini:

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “

“Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue sudah banyak berbuat seperti pembukaan wisata realiji yang baru-baru ini dilakukan selain itu Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Simeulue dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Simeulue secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah,; mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja; melestarikan budaya lokal; meningkatkan perkembangan masyarakat;”.

(Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

Kemudian NS (Asisten dua Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue sudah banyak membuka peluang usaha seperti pembukaan tempat wisata di babagi daerah baik di tingkat kabupaten maupunj desa sudah dilakukan yang bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengaggruran dapat berkurang serta adanya tingakat pendapatan masyarakat(Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue sudah banyak berbuat seperti pembukaan wisata realiji yang baru-baru ini dilakukan selain itu Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Simeulue dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue Sudah bagus, tergantung yang menjalankan. Ada beberapa yang menjalankan tidak benar, jadi hasilnya tidak

maksimal. Mungkin jika yang menjalankan benar hasilnya akan bagus. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut telaah kami Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue sudah dilakakukan sesuai dengan kemampuan daerah seperti yang diharapkan masyarakat, bagian ekonominya seperti pemerataan bibit padi, untuk teknologi sudah ada kemajuan dibagian jaringan telephone walaupun kenyataannya banyak yang belum tercapai. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue masih sangat kurang karena kami rakyat kecil masih susah dalam mencari pekerjaan sehingga tingkat kesejahteraan kami otomatis sangat kurang, apa lagi sekarang ini covid kan maka lebih susah lagi kami dalam memenuhi kebutuhan kami. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue selama ini sudah bagus , sudah sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kalau dibilang sejahterah kayakanya masih jauh untuk kami sebagai masyarakat biasa (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa visi misi Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue secara pemerintahan sudah dijalakan secara maksimal namun realisasi yang di realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Fokus penelitian yang ketiga yaitu pengembangan alternatif dari misi Bupati tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa orang narasumber terlihat dan terungkap dalam penelitian lapangan dibawah ini:

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “Pengembangan alternatif dari misi Bupati tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka dari itu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan baru seperti menekankan setiap stehonder untuk bekerja secara maksimal dan adanya pengawawan lebih ketat demi tercapainya misi tersebut”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

NS (Asisten II Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Pengembangan alternatif dari misi Bupati adalah kalau menurut saya Alternative nya saya tidak tau, mungkin pak Bupati punya alternative yang kita tidak tahu. Namun setau saya menggerakkan seluruh aspek baik dari segi pemerintahan maupun anggota dewan setempat, serta meminta saran dari setiap staf ahli yang ada sehingga apa yang menjadi misi dapat tercapai (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya Mengajak berdiskusi dengan Bupati untuk menanyakan kenapa visi misinya tidak berjalan, dan menuntut untuk memenuhi janjinya seperti yang dikatakan ketika kampanye. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya Pengembangan alternatif dari misi Bupati adalah dengan terus percaya dan yakin apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini tidak lain hanya untuk kesejahteraan masyarakat serta kita sebagai mahasisiwa juga harus bisa menyumbangkan saran demi

tercapainya mision tersebut. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) bahwa: Pengembangan alternatif dari misi Bupati bagi saya kurang tahu saya karena kami masyarakat kecil. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Pengembangan alternatif dari misi Bupati yaitu mengajak segenap pemangku jabatan untuk sama-sama mencari solusi sehingga misi tersebut harus tercapai(Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kalau menurut saya tidak ada pengembangan alternatif karena saya tidak tahu (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa Pengembangan alternatif dari misi Bupati yaitu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan baru seperti menekankan setiap stehonder untuk bekerja secara maksimal dan adanya pengawawan lebih ketat demi tercapainya misi tersebut .

Fokus penelitian yang Keempat yaitu kelayakan misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa orang narasumber terlihat dan terungkap dalam penelelitian lapangan dibawah ini:

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak". (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

Kemudian NS (Asisten dua Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak karena Layak atau tidak itu masyarakat yang akan menilai, tapi seperti yang kita lihat semua yang sudah dijalankan memang layak untuk dilakukan”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sangat layak karena dunia kita saat ini adalah dunia teknologi dimana sinyaknya sudah tidak susah lagi saat ini tidak perlu naik gunung lagi. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut telaah kami Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat layak dijalankan karena memang kebutuhan masyarakat saat ini. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-

tengah masyarakat sudah sangat bagus serta layak. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat Layak, dan sangat mengapresiasi. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak karena Layak atau tidak itu masyarakat yang akan menilai, tapi seperti yang kita lihat semua yang sudah dijalankan memang layak untuk dilakukan .

Fokus penelitian yang Kelima yaitu hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue, berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa orang narasumber terlihat dan terungkap dalam penelitian lapangan dibawah ini:

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue Belum bisa kita evaluasi karna belum habis, mungkin bappeda bisa evaluasi karena mereka punya indicator nya ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

Kemudian NS (Asisten dua Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Kita bisa tau hasil evaluasinya itu ditahun terakhir menjabat, disitu baru ketahuan berapa persen pencapaian yang telah terlaksana dari visi dan misi yang telah dilakukan (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue Belum bisa kita evaluasi karna belum habis, mungkin bappeda bisa evaluasi karena mereka punya indicator nya”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya hasil akhirnya adalah belum tercapainya keseluruhan dari misi yang di rencanakan. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut telaah kami kenyataannya banyak yang belum tercapai. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue Belum bisa kita ketahui. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah selama ini sudah bagus , sudah sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum tahu apa hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue nantinya. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa hasil akhir dari penerapan misi Bupati Simeulue Belum bisa diketahui karena masa jabatannya belum habis.

Fokus penelitian yang Keenam yaitu implementasikan secara menyeluruh tentang visi dan misi Bupati Simeulue berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa orang narasumber terlihat dan terungkap dalam penelelitian lapangan dibawah ini:

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa: “kalau secara keseluruhan terkait visi misi Bupati simeulue pada saat ini sudah tercapai 80 persen dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

Kemudian NS (Asisten dua Kantor Bupati) dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Implementasi secara keseluruhan sudah maksimal karena Pak Bupati dilantik dengan visi dan misi, dan Alhamdulillah ada misi yang sudah terealisasi dibidang jalan, dan sekarang lagi marak-maraknya pemerintah melaksanakan tingkat ekonomi, dan juga dibidang kesehatan ada yang sedang dibangun pukesmas dan Alhamdulillah ada yang sudah siap, dan kita bisa lihat bersama, dan di RS bisa kita lihat ada penambahan bangunan baru yang dulunya tidak ada. Dampak yang dapat kita lihat, kalau bangunan itu tidak ada, pasti masyarakat tidak percaya dengan visi misi kita (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

LS (Mahasiswa) mengatakan: Menurut saya implementasi pemerintah selama ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan. (Wawancara tanggal 23Februari 2021).

NR (Mahasiswa) mengatakan: Menurut telaah kami Implementasi secara keseluruhan pemerintah selama ini sudah dijalankan sesuai dengan konsep dan visi misi Bupati terpilih. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020).

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Implementasi secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Simelue kalau menurut saya masih banyak yang belum beres. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Belum, mungkin secara usaha sudah dilakukan secara totalitas tapi untuk hasilnya masih belum. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum meratanya pembangunan secara keseluruhan, artinya visi misi yang sudah di paparkan dihadapan masyarakat dulu belum berjalan sebagaimana yang dikatakan. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa Implementasi secara keseluruhan pemerintah sudah dijalankan secara maksimal yaitu aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil.

4.3.2 Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai.

Faktor kendala merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam menjalankan misi pada suatu daerah sehingga berimbas pada pembangunan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan NS selaku Asisten II Kantor Bupati Simeulue mengatakan bahwa faktor kendala yang menjadi problem selama ini diantaranya adalah :

1. Keuangan Daerah

Pada Keuangan pemerintah yaitu Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll.. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara

persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kabupaten Simeulue sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

2. Sumber daya Ekonomi

Kendala di sumber daya ekonomi dimana yaitu :

- a. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan. Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit.
- b. Rendahnya Produktifitas padi yang dihasilkan. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian
- c. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Simeulue. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki masih belum memadai.
- d. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.

- e. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
 - f. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya coldstorage untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba, bom, setrum dan bom serta adanya pencurian ikan di laut, baik oleh masyarakat dari daerah lain maupun oleh warga negara asing. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
 - g. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
 - h. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.
 - i. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
 - j. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.
 - k. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
18. Masih belum mampunya Kabupaten Simeulue dalam

menarik minat investor dalam hal penanaman modal baik dalam maupun asing.

- l. Rendahnya tingkat pemeliharaan tanaman baik pangan maupun perkebunan rakyat.
3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dimana
- a. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
 - b. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.
 - c. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
 - d. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia profesional dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
 - e. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Berdasarkan data di atas maka dapat dipahami bahwa jika kendala diatas sudah bisa diatasi maka pencapaian misi Bupati terpilih saat ini sangat mudah untuk direalisasi.

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Analisis pencapaian visi misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi”

Pencapaian visi misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi belum terealisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati simeulue pada saat ini sudah tercapai 80 persen sehingga perlu adanya terobosan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Simeulu demi tercapainya visi misi secara menyeluruh.

Visi misi Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah simelue secara pemerintahan sudah dijalankan secara maksimal namun realisasi yang di realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik. Pengembangan alternatif dari misi Bupati yaitu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan baru seperti menekankan setiap stehonder untuk bekerja secara maksimal dan adanya pengawasan lebih ketat demi tercapainya misi tersebut.

Misi Bupati Simeulue terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak seperti yang kita lihat semua yang sudah dijalankan memang layak untuk dilakukan. Implementasi secara keseluruhan pemerintah sudah dijalankan secara maksimal yaitu aspek pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, sudah hampir menyeluruh atau sudah mencapai 87 % pemberdayaan ekonomi masyarakat

dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil sudah dilaksanakan 76 % dan sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

Visi misi Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Simelue secara pemerintahan sudah dijalankan secara maksimal namun realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik atau baru tercapai yaitu 65 % dan sisanya sedang dikerjakan pada tahun 2021 ini.

Kemudian Implementasi secara keseluruhan pemerintah sudah dijalankan secara maksimal yaitu aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil seperti home industri (Kerajinan tangan, tukang jait dan tungkang tempel ban) dan kios-kios kecil. Kaitan Penelitian ini dengan teori Scott A. Bernard (2005, h. 117), sebuah visi mendeskripsikan secara singkat strategi kompetitif dari sebuah perusahaan. Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat. Sebuah pernyataan visi lebih dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi ditujukan pada semua anggota dari perusahaan untuk mengerti arah dan tujuan utama yang sedang dituju, agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut keluar dan kedalam perusahaan. Sebuah pernyataan misi mendeskripsikan secara ringkas tujuan dari perusahaan. Pernyataan misi ini biasanya panjang untuk menjelaskan poin pada misi tetapi tidak terlalu mendetail. Sebuah pernyataan misi menjawab pertanyaan “Siapakah kami?” pada tingkat keseluruhan perusahaan. Sebuah visi mendeskripsikan secara singkat strategi kompetitif dari sebuah perusahaan. Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat.

Sebuah pernyataan visi lebih dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi ditujukan pada semua anggota dari perusahaan untuk mengerti arah dan tujuan utama yang sedang dituju, agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut keluar dan kedalam perusahaan. Sebuah pernyataan misi mendeskripsikan secara ringkas tujuan dari perusahaan. Pernyataan misi ini biasanya panjang untuk menjelaskan poin pada misi tetapi tidak terlalu mendetail.

5.2 Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai

Kendala merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam menjalankan misi pada suatu daerah sehingga berimbas pada pembangunan.

Adapun Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 diantaranya adalah Faktor penghambat eksternal yaitu keuangan, sumber daya ekonomi dan SDM di mana tingkat pengangguran yang masih diatas rata-rata yaitu 60 persen pengangguran dan hanya 40 persen yang berkerja di instansi pemerintah dan swasta yang dalam pembangunan diantaranya adalah Faktor penghambat dari luar atau eksternal dalam pencapaian visi misi Bupati adalah diantaranya adalah Kebijakan program berdasarkan hasil kesepakatan antara Bupati dan DPRK setempat sehingga program yang dijalankan tidak selaras dengan misi Bupati . Kaitan Penelitian ini dengan misi Bupati yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, adalah dimana pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha

pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu.

Selain kendala diatas juga ada kendala yang paling utama yaitu Keuangan Daerah Pada Keuangan pemerintah yaitu Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll., Sumber daya Ekonomi serta Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dimana Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia profesional dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan..

Kemudian di bidang teknologi komunikasi di level daerah (Kabupaten Simeulue) dengan penggunaan TIK merupakan bagian dari perkembangan teknologi komunikasi. Sebagaimana konsep sistem yang terdiri atas beberapa sub-sistem yang bekerja untuk totalitas tujuan sistem komunikasi, maka program PLIK merupakan determinasi sistem komunikasi di supra-sistem (pembangunan informasi di tingkat provinsi dan nasional) sesuai dengan semangat Pancasila,

UUD'45, otonomi daerah, dan keterbukaan informasi publik. Lingkungan sistem sosial yang menjadi bagian sistem komunikasi pembangunan daerah berkenaan dengan implementasi PLIK adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, PT. Telkom Indonesia, dan mitra pendampingnya. Selain itu warga sebagai pengguna, dan pengelola PLIK. Mereka semua bisa disebut sebagai stakeholder dari PLIK. Program pembangunan PLIK belum melibatkan masyarakat tetapi dikelola langsung oleh dinas melalui pihak ketiga, sehingga pola komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak memberikan akses pembelajaran bagi masyarakat untuk menggali inisiatif, kreativitas dan prakarsa lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Program-program tersebut Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan Dalam Sistem Komunikasi Pembangunan Daerah bersifat top-down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya. Akibatnya, pola komunikasi pembangunan sebagaimana tercermin dalam kegiatankegiatan forum komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak cukup memberi ruang bagi stakeholders untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses komunikasi, sejak pada tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Tidak sinerginya subsistem-sub-sistem dalam sitem tersebut membuat proses adopsi teknologi yang diperkenalkan kurang mendapat respon masyarakat. Seperti diketahui dalam sistem proses adopsi, sub-sistem yang ada di dalamnya adalah masyarakat, pemerintah desa, pendamping, dan opinion leader. Beberapa sub-sistem masih berorientasi pada output, yakni internetisasi desa dengan ukuran target tertentu

berdasarkan waktu tertentu pula. Ini dapat dilihat dari awal ketika teknologi diperkenalkan, masyarakat dibiarkan sendiri menggunakan teknologi tersebut tanpa ada tenaga pendamping. Masyarakat yang memiliki persepsi kompleksitas suatu teknologi informasi dibiarkan sehingga persepsi tersebut makin menguat yang berakibat pada apatisme. Dalam pelaksanaannya, PLIK menuai kritik karena penempatan yang cenderung berada di ruas jalan besar, tidak tepat sasaran khalayak karena penggunaanya hanya kalangan tertentu, bahkan satu unit perangkat PLIK di pasang di salah satu SKPD Pemerintahan Kabupaten Simeulue.

Penetapan unit PLIK di kabupaten tidak memenuhi asas pemerataan, rendahnya motivasi penggunaan warga desa, rendahnya pengetahuan TIK oleh warga desa, kurangnya pelatihan TIK di kalangan warga perdesaan yang awam komputer, lemahnya pendampingan pemanfaatan TIK oleh SKPD pemerintah daerah, tidak kuatnya kelembagaan pemerintah yang mendukung program PLIK, dan faktor investasi infrastruktur di kecamatan yang tidak memadai, seperti kurangnya pasokan listrik atau sering terjadi pemadaman listrik seperti di Desa Nasrehe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, sehingga hanya tinggal dua unit komputer PLIK yang dikelola KUD Karya Muda yang dapat beroperasi. Faktor-faktor tersebut bisa saling terkait. Rendahnya motivasi dalam menggunakan internet bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang TIK warga desa. Namun ada juga yang justru memiliki pengetahuan tentang internet, mereka juga tidak memanfaatkannya. Seperti yang terjadi di Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, tetapi hanya efektif berjalan selama 6 bulan saja. Masyarakat menilai fasilitas yang disediakan tidak

seperti yang mereka perkirakan. Warga enggan menggunakan, meskipun kualitas perangkat komputer baik namun akses internet dinilai lambat, sistem operasi komputer menggunakan open source yang kurang familiar serta ruangan yang tidak menggunakan penyejuk ruangan, sehingga banyak perangkat komputer yang rusak dan pengunjung merasa gerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tentang Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 pada saat ini sudah tercapai namun belum maksimal dimana misi yang sudah tercapai yaitu aspek pembangunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil sedangkan misi yang belum tercapai diantaranya adalah tingkat pengangguran masih tinggi, kesenjangan ekonomi, penguatan sinyal telkom dan jalan di daerah pelosok desa.
2. Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 diantaranya adalah Faktor internal yaitu keuangan, sumber daya ekonomi dan SDM, sedangkan Faktor kendala dari luar atau eksternal dalam pencapaian visi misi Bupati adalah diantaranya adalah Kebijakan program berdasarkan hasil kesepakatan antara Bupati dan DPRK setempat sehingga program yang dijalankan tidak selaras dengan misi Bupati .

6.2 Saran

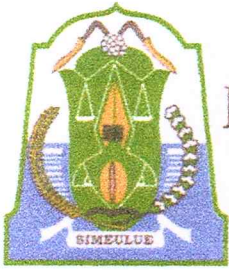
Dengan melihat uraian-uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, penulis memberikan alternatif pemecahan berupa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Simelue Diharapkan terus bekerja dan bebenah demi tercapainya visi misi yang direncanakan sehingga semua misi yang direncanakan terealisasi.
2. Bagi Masyarakat dapat selalu menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara bersama, sehingga akan bisa terus dinikmati dalam waktu yang lama, serta adanya kerja sama saling membenah antara pemerintah dengan demasyarakat setempat serta Diharapkan adanya peningkatan kinerja pemerintah kecamatan dan desa demi terealisasinya Visi dan Misi Bupati Terpilih sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat merata sampai ke pelosok desa .
3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut , maka dapat menggunakan metode-metode yang lain serta argumensi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana.
- Atik, dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Efri Novianto. 2013. *Evaluasi Kinerja Pemerintahan Gerbang Raja*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 No 1 (2013), Universitas Kartanegara.
- Dwi Sukaningtyas. 2016. *Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah dalam Membangun Pemahaman Visi dan Misi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ke-2. Jakarta: PT Indeks.
- Desler. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Bahasa, Jilid I. Jakarta. PT. Prehalindo.
- Falikhatun, 2003. "Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Variabel Pemoderasi Ketidak pastian Lingkungan Dan Kohesivitas Kelompok". Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Hal.207-221, Vol. 6, No.2 Septerber 2007.
- Gomes, Faustino Cardoso. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hariandja. 2007. *Perilaku Organisasi*. Bandung. Sinar Baru.
- Idris. 2017. *Implementasi kebijakan visi dan misi pembangunan periode pertama pemerintahan kota tidore kepulauan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nuku Tidore
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi. 2001. *Balance Scorecard: alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ranggi. 2018. *Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)*. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.01 Agustus 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Subana, M dan Sudrajat. 2012. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung Pustaka. Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung Alfabeta.
- Suparmoko. 2012. *Ekonomi Pembangunan. Edisi kelima*. Yogyakarta. BPFE. UGM
- Taslim Sahmad, Deddy T, Tikson, H. Badu Achmad. (2012). *Gaya Kepemimpinan Bupati Luwu di Belopa Provinsi Sulawesi Selatan: Pandangan Managerial Grid*. Jurnal Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin.
- Winardi. 2012. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, Y. dan Purnomo, M. 2001. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Undang-Undang
- UU RI Nomor 25 Tahun 2005. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- UU RI Nomor 5 Tahun 2015 Perubahan dari UU RI Nomor 32 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. *Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Perencanaan Pembangunan*.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BADAN KESBANGPOL)

Jalan Bonol Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Telp/Fax. (0650) 8001029

SINABANG

Kode Pos 23891

Sinabang, 23 Desember 2020 M
08 Djumadil Awal 1441H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar
di –

Meulaboh

nomor : 070/407/2020
ampiran : -
perihal : SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

1. Sehubungan dengan hasil laporan Mahasiswa yang bersangkutan dan untuk memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Nomor : 832/UN59.5/PT.01.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian Skripsi, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue menerangkan bahwa :

Nama : **IIN SARTIKA**
Tempat Tgl. Lahir : Meunafa, 08 Juni 1996
NPM : 1605905010104
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dsn. Bukit Manggis Desa Meunafa Kec. Salang
No. Hand Phone : 0853 6163 3146

2. Bahwa nama tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang : **ANALISIS CAPAIAN VISI MISI BUPATI SIMEULUE PERIODE 2017 - 2021 DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020**
3. Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Simeulue,



T. RIDUAN, SP

Pembina Tk. I

NIP.19730601 200112 1 002

abusan :

Bapak Bupati Simeulue (sebagai laporan)
Ketua DPRK Simeulue di Sinabang
arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 832/UN59.5/PT.01/04/2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian Skripsi**

8 Juli 2020

Yth,
Bapak Bupati Simeulue
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Im Sartika
NIM : 1605905010104
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **"Analisis Capaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2021"**
Pembimbing Utama : Nellis Mardhiah, M. Sc
Pembimbing Anggota : Sudarman, M. Ag

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wakil Dekan

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan,
- Mahasiswa
- Arsip

DOKUMENTASI





